

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA-P)**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah SWT, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Mencermati kondisi persaingan daerah yang semakin ketat dan disisi lain banyaknya permasalahan yang harus dihadapi, maka Dinas Perhubungan selaku fasilitator Pemerintah dalam menjembatani antara kepentingan Pemerintah dan masyarakat pelaku usaha telah menyusun suatu dokumen Rencana Kerja (Renja) 1 (satu) tahun kedepan.

Recana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada Renstra dan RKPD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Diharapkan nantinya Renja Perubahan 2025 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Sekayu, 28 Juni 2025

Kepala Dinas Perhubungan

The image shows a circular official stamp of the Musi Banyuasin District Government. The text around the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Musni Wijaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19690608 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
SK TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan Renja.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II.21	
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Renja PD	35
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.....	48
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	48
3.2 Program dan kegiatan.....	48
BAB IV PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023....11

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 Kabupaten Musi Banyuasin.....13

Tabel 2.3 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
Triwulan II.....22

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kab. Musi
Banyuasin..... 36

Tabel 2.5 Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kab.
Musi Banyuasin..... 47

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024..... 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
--	---



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Kol. Wahid Udin No.531 LK. VII Kel. Serasan Jaya Sekayu

Email : dishub.musibanyuasinkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : B-500.11/ 467 /SK /DISHUB /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan untuk adanya tolak ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahunan;
- b. Bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pedoman penyiapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dinas Perhubunga Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-

- Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan PP. No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) di perbarui dengan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Nomor 265 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025.**
- Kesatu : Mengesahkan Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 01 Juni 2025

Kepala Dinas Perhubungan,



Musni Wijaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

NOMOR : B-500.11/ 467 /SK/ DISHUB/ 2025

TANGGAL : 01 JUNI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.

Ketua Tim (Koordinator) : Musni Wijaya, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin)

Sekretaris : Mohammad Reza Kurniawan, S.STP., M.Si (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

Anggota : 1. Agus Kurniawan Saputra, S.IP., M.Si (Sekretaris)
2. Ahmad Wendiansah, S.SiT., SH., M.Si (Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan & Rel)
3. Mujiman, A.Md. LLASDP., SH., M.Si (Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan & Perhubungan Udara)
4. Ardiyan Ikhwan Z, A.Md. LLAJ., SH (Kepala Bidang Keselamatan)
5. Herianto, SE., M.Si (Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian)

Kepala Dinas Perhubungan,



Musni Wijaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : B-500.11/ *Gso* /SK /DISHUB /2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan untuk adanya tolak ukur pencapaian program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu adanya program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 untuk menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahunan;
- b. Bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pedoman penyiapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c. Bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dinas Perhubunga Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No.

56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan PP. No 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) di perbarui dengan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-588 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Nomor 265 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025.**
- Kesatu : Mengesahkan Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Kepala Dinas Perhubungan,



Musni Wijaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630608 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

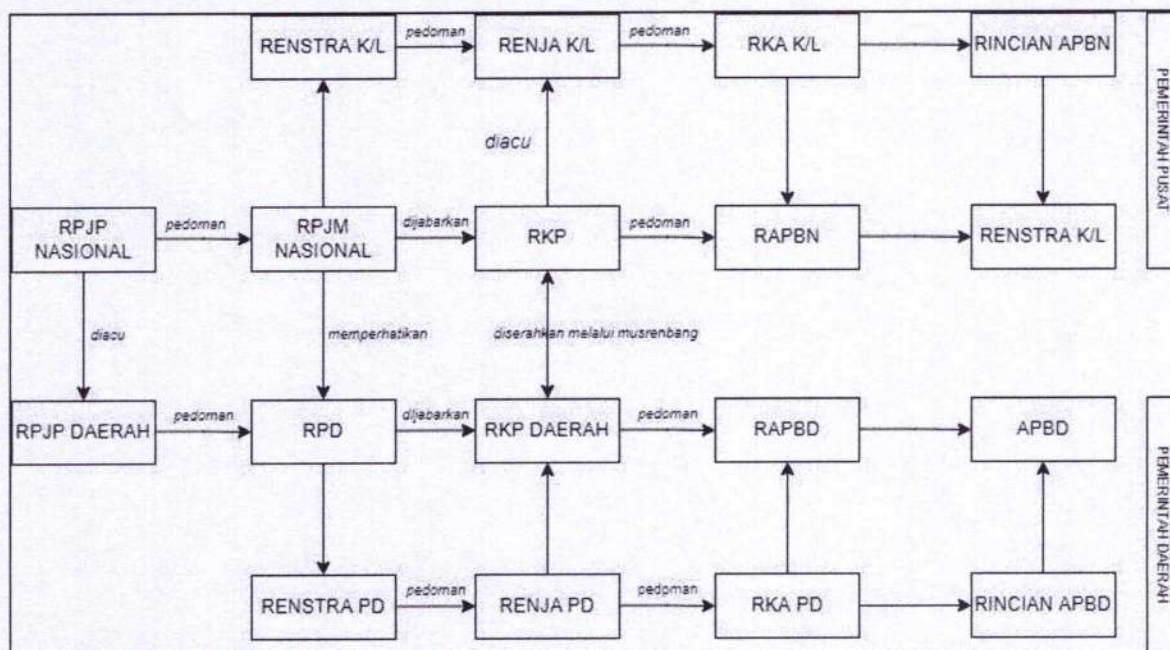
Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja (Renja) Perubahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan membuat rencana kerja perubahan untuk setiap tahun dalam rangka turunan tindak lanjut dari Rencana Strategis yang sudah dibuat sebelumnya yang memuat rencana kerja SKPD tersebut selama kurun waktu periode lima tahun. Adapun proses penyusunan Renja SKPD secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Renja SKPD disusun oleh setiap SKPD setelah menerima surat edaran kepala daerah tentang penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan Renja SKPD
2. Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD berpedoman pada RKPD
3. Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi Perubahan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin
4. Rancangan Renja SKPD yang telah sesuai RKPD disampaikan oleh Bappeda kepada Kepala Daerah untuk di sahkan
5. Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah PERKADA RKPD ditetapkan
6. Penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD paling lambat 14 hari setelah Renja SKPD disahkan

Adapun keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 265 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah bagi seluruh Tingkatan Manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, membangun sistem kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan penjabaran lebih detail terhadap kebijakan Dinas Perhubungan;
2. Menyiapkan tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya dalam penilaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;

3. Menyiapkan indikator sasaran program dan kegiatan di Tahun Anggaran;
4. Memberikan penjabaran lebih detail terhadap kebijakan Dinas;
5. Sebagai bahan penyusunan APBD;
6. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja pada tahun berikutnya, penganggaran dan program lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Sistematika Penulisan Renja

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Memuat Pengertian Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja PD, Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta tidak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang Undang-Undang dan Peraturan- Peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan, Memuat maksud dan tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, memuat Pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja PD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Memuat tentang capaian program dan kegiatan OPD mulai 2024 hingga capaian triwulan II tahun 2025.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Memuat Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses, temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Memuat Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para *stakeholders*.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Memuat Bagian ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD, Memuat Perumusan tujuan dan sasaran didasari atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan, Memuat Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, kesesuaian program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa: a. Catatan penting ang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutug, Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini memuat review (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan. Pokok- pokok materi yang disajikan dalam bagian ini adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targetkinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PerangkatDaerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

❖ Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - Anggaran | : Rp. 78.100.000,00,- |
| - Realisasi Fisik | : 100% |
| - Realisasi Keuangan | : 35,97% |

2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ##### **❖ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

- Anggaran : Rp. 1.618.049.528,00,-
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Keuangan : 77,43% %

b. Program Pengelolaan Pelayaran

1) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

❖ Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/kota

- Anggaran : Rp. 98.976.000,00,-
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Keuangan : 74,96%

c. Program Pengelolaan Penerbangan

1) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter

❖ Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter

- Anggaran : Rp. 98.976.000,00,-
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Keuangan : 74,96%

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 44.977.047,00,- terealisasi sebesar Rp. 39.160.000,00,- dengan Persentase 87,07%.

b. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd sebesar Rp. 20.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 18.354.000,00,- dengan Persentase 91,77%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn sebesar Rp. 5.810.413.190,00,- terealisasi sebesar Rp. 5.331.149.125,00,- dengan Persentase 91,75%.

3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

a. Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd sebesar Rp. 70.135.750,00,- terealisasi sebesar Rp. 67.263.440,00,- dengan Persentase 95,90%.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp. 99.983.000,00,- terealisasi sebesar Rp.94.280.000,00,- dengan Persentase 94,30%.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 19.994.380,00,- terealisasi sebesarRp. 19.989.835,00,- dengan Persentase 99,98%.
- b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 175.772.939,00,- terealisasi sebesar Rp. 175.398.200,00,- dengan Persentase 99,79%.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 49.995.066,00,- terealisasi sebesar Rp. 43.541.700,00,- dengan Persentase 87,09%.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 179.992.150,00,- terealisasi sebesar Rp. 179.966.100,00,- dengan Persentase 99,99%.
- e. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan sebesar Rp. 99.999.878,00,- terealisasi sebesar Rp. 98.559.040,00,- dengan Persentase 98,56%.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.846.000,00,- dengan Persentase sebesar 99,38%.
- g. Penyediaan Bahan/material sebesar Rp. 43.784.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 41.672.000,00 dengan Persentase 95,18%.
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 40.000.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 37.278.000,00,- dengan Persentase 93,20%.
- i. Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd sebesar Rp. 349.991.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 310.095.000,00,- dengan Persentase 88,60%.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan sebesar Rp. 740.413.200,00 terealisasi sebesar Rp. 721.713.200,00 dengan Persentase 97,47%
- b. Pengadaan Mebel sebesar Rp. 74.134.765,00,- terealisasi sebesar Rp. 68.730.000,00,- dengan Persentase 92,71%.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik sebesar Rp. 285.858.828,00,- terealisasi sebesar Rp. 255.439.170,00,- dengan Persentase 89,36%.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 2.550.911.200,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.517.600.000,00,- dengan Persentase 98,69%.

- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 158.948.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 156.251.243,19,- dengan Persentase 98,30%.
 - b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya sebesar Rp. 24.400.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 24.395.000,00,- dengan Persentase 99,98%.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/kota sebesar Rp. 1.274.152.500,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.206.553.380,00,- dengan Persentase 94,69%.
 - b. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan sebesar Rp. 446.158.200,00,- terealisasi sebesar Rp. 396.410.000,00,- dengan Persentase 88,85%.
- 2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - a. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 94.240.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 94.091.677,00,- dengan Persentase 99,84%.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 71.052.800,00,- terealisasi sebesar Rp. 70.867.380,00,- dengan Persentase 99,74%.
 - c. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 30.282.400,00,- terealisasi sebesar Rp. 26.102.174,00,- dengan Persentase 86,20%.
 - d. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 323.516.700,00,- terealisasi sebesar Rp. 309.209.911,00,- dengan Persentase 95,58%
 - e. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 40.626.600,00,- terealisasi sebesar Rp. 37.952.342,00,- dengan Persentase 93,42%.
- 3) Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
 - a. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 166.264.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 150.140.980,00,- dengan Persentase 90,3%.
- 4) Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit Dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/

Kota sebesar Rp. 1.194.813.673,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.025.065.939,00,- dengan Persentase 85,79%.

C. Program Pengelolaan Pelayaran

- 1) Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau sebesar Rp. 253.391.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 223.499.745,20,- dengan Persentase 88,20%.
 - b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau sebesar Rp. 481.277.762,00,- terealisasi sebesar Rp. 391.614.478,00,- dengan Persentase Rp. 81,37%.

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : tidak ada

4. Faktor Penyebab tidak, sesuai dan melebihi target kinerja :

- Tercapainya kegiatan pada Dinas Perhubungan dikarenakan kegiatan yang ada selalu termonitor dan selalu dilakukan evaluasi setiap semester;
- Tidak tercapainya kegiatan pada Dinas Perhubungan seperti sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dikarenakan sub kegiatan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan diklat yang dilaksanakan. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dikarenakan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/kota dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada serta Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter dikarenakan pemeliharaan pesawat tidak dilaksanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

1. Sub kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Target peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM tidak sepenuhnya tercapai, Menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan pengembangan SDM dengan pelatihan yang tersedia.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/kota Berpotensi Menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal.
4. Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Menyebabkan realisasi anggaran tidak maksimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut:

- a. Memprioritaskan sub kegiatan yang memang mendukung prioritas kabupaten pada tahun 2025.
- b. Menyusun anggaran seefisien mungkin agar tidak menjadi silpa dan terlaksana 100%.

Sementara itu, berdasarkan Realisasi Anggaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 17.155.587.756,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.574.719.887,39,- dengan persentase capaian sebesar 90,79%

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	DINAS PERHUBUNGAN		17.155.587.756,00	15.574.719.887,39	90,78
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	12.560.853.921,00	11.506.691.620,19	91,61
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.641.106.873,00	3.316.393.783,00	91,08
		Program Pengelolaan Pelayanan	833.644.762,00	689.303.288,20	82,69
		Program Pengelolaan Penerbangan	119.982.200,00	62.331.196,00	51,95

Secara umum Belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2024 secara fisik tercapai 100% namun secara keuangan terealisasi 90,78% dari anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah realisasi anggaran Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 5.333.869.125,00,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.632.241.360,19,- Belanja Hibah Rp. 80.830.000,00,- sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 2.527.779.402,20,- dengan demikian total realisasi anggaran baik. Jika dilihat dari realisasi keuangan diukur melalui 4 program, terdapat 2 program dengan capaian diatas 85% (kategori baik). Berikut tabel T-C.29 merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2025 (tahun berjalan) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik									
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen				
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		2 Laporan				
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Output :	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-		1 Data				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran							
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output :	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			49 Orang	49 Orang	51 Orang		
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran							
2	15	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Output:	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu							
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Output:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	-		
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8 Orang	8 Orang	16 Orang		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perkantoran							
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket		
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Output:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Output:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket				
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Output:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket				
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output:	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket				
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Output:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen		-				
2	15	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan Material	Output:	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		1 Paket				
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan tamu	Output:	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan				
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan				
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik									
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Output:	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		1 Unit				
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Output:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit		17 Unit				
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang perkantoran									
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Output:	Langganan Telepon, Air dan Listrik serta TV Satelit	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output:	Terpenuhinya Administrasi Perkantoran dan Pembayaran Gaji non PNS	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan				
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik									
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	19 Unit		19 Unit				
2	15	01	2.08	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		1 Unit				
2	15	01	2.08	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output:	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit		40 Unit				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Jalan dalam kondisi baik									
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota									
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Output:	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1187 Unit			215 Unit				
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Output:	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	63 Unit			103 Unit				
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	02	2.04	0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Output:	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-		1 Dokumen				
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor									
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit		-				
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output:	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	10 Orang		9 Orang				
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output:	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Output:	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	-		5 Laporan				
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output:	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit		10 Unit				
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Output:	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan				
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Output:	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-		5 Laporan				
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Output:	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		6 Laporan				
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Output:	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	-	-		1 Dokumen				
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Output:	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan			3 Laporan				
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Output:	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana Prasarana Pelayaran dalam kondisi baik									
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili orang Perseorangan Waraga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase terlaksananya penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Output:	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau									
2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Output:	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Output:	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Unit	10 Unit		10 Unit				
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Output:	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	-	-		1 Unit				
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Output:	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	-	-		176 Unit				
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 15 04 2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase terlaksananya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter									
2 15 04 2.01 0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Output:	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen				

Mengetahui
Kepala Dinas Perhubungan,



MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001

Dari tabel Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 Program, 16 Kegiatan dan 40 sub kegiatan, sedangkan untuk tahun 2024 terdapat 4 Program dengan 15 Kegiatan dan 35 sub kegiatan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Triwulan II

Pada tahun Pagu Indikatif 2025 sebesar 17.816.213.157,40 telah terealisasi pada triwulan II (Juni) 2025 sebesar Rp. 6.373.014.024,00. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 16.176.433.113,00,- dengan tingkat Realisasi Rp. 6.357.562.824,00,- sedangkan untuk anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.639.780.044,40,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 15.451.200,00,-.

Berikut Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2024 Triwulan II dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Triwulan II

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
2.15.17	Dinas Perhubungan	17.816.213.157,40	5.854.529.271,95	32,86	6.373.014.024,00	35,77	39,07	38,04
1.15.2.15.17.1.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.772.142.543,40	5.237.496.707,90	44,49	5.596.891.646,00	47,54	49,25	49,92
1.15.2.15.17.1.15.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.557.150,00	12.529.030,00	18,01	44.070.000,00	63,36	31,52	67,33
1.15.2.15.17.1.15.1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.445.150,00	9.489.030,00	20	33.582.000,00	70,78	35	75
1.15.2.15.17.1.15.1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.200.000,00	3.040.000,00	20	10.488.000,00	69	35	74

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.1.02.01.02.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	6.912.000,00	0	0	0	0	0	0
1.15.2.15.17.1.15.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.912.145.252,00	3.456.072.626,00	50	3.140.614.844,00	45,44	50	50
1.15.2.15.17.1.15.1.02.02.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.912.145.252,00	3.456.072.626,00	50	3.140.614.844,00	45,44	50	50
1.15.2.15.17.1.15.1.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	68.734.750,00	34.367.375,00	50	66.945.720,00	97,4	100	100
1.15.2.15.17.1.15.1.02.03.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	68.734.750,00	34.367.375,00	50	66.945.720,00	97,4	100	100
1.15.2.15.17.1.15.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	10.000.000,00	10	4.611.300,00	4,61	30	5
1.15.2.15.17.1.15.1.02.05.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	10.000.000,00	10	4.611.300,00	4,61	30	5
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.309.677,60	104.715.249,20	20,56	210.892.623,00	41,41	41,42	53,5

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	10.000.000,00	50	13.938.270,00	69,69	70	75
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.276.203,60	44.138.101,80	50	60.406.200,00	68,4286	100	70
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	4.000.000,00	10	18.685.451,00	46,71	50	50
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.795.474,00	8.379.547,40	10	81.225.669,00	96,93	20	100
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.500.000,00	4.250.000,00	10	14.961.836,00	35,2	20	40
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	5.000.000,00	10	0	0	40	5

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.1.02.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.738.000,00	28.947.600,00	20	66.630.197,00	46,04	30	50
1.15.2.15.17.1.15.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.928.912,80	93.464.456,40	50	159.840.000,00	85,51	100	86,66
1.15.2.15.17.1.15.1.02.07.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.000.000,00	81.000.000,00	50	159.840.000,00	98,67	100	100
1.15.2.15.17.1.15.1.02.07.02.07.05	Pengadaan Mebel	24.928.912,80	12.464.456,40	50	0	0	100	0
1.15.2.15.17.1.15.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.956.639.655,00	978.319.827,50	50	1.166.146.357,00	59,6	50	50
1.15.2.15.17.1.15.1.02.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.729.655,00	127.364.827,50	50	119.846.357,00	47,05	50	50
1.15.2.15.17.1.15.1.02.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.701.910.000,00	850.955.000,00	50	1.046.300.000,00	61,48	50	50

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.968.827.146,00	548.028.143,80	27,84	803.770.802,00	40,82	42,9	45,05
1.15.2.15.17.1.15.1.02.09.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.754.427.146,00	526.328.143,80	30	795.770.802,00	45,36	45	50
1.15.2.15.17.1.15.1.02.09.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	9.500.000,00	5	0	0	20	0
1.15.2.15.17.1.15.1.02.09.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.400.000,00	12.200.000,00	50	8.000.000,00	32,79	70	40
1.15.2.15.17.1.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.612.892.560,00	447.057.853,25	12,37	683.931.688,00	18,93	21,09	21,58

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.145.385.200,00	85.275.150,00	3,97	4.638.580,00	0,22	9,98	1,07
1.15.2.15.17.1.15.2.02.02.02.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.720.168.200,00	231.750,00	0,01	1.350.000,00	0,08	5,03	0,09
	1. Pemeliharaan dan Operasional ETLE	450.000.000,00	0	0	0	0	5	0
	2. Pengadaan Perlengkapan Jalan	1.265.533.200,00	0	0	0	0	5	0
	3. Administrasi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/kota	4.635.000,00	231.750,00	5	1.350.000,00	29,13	15	35
1.15.2.15.17.1.15.2.02.02.02.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	425.217.000,00	85.043.400,00	20	3.288.580,00	0,77	30	5
1.15.2.15.17.1.15.2.02.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	6.413.400,00	641.340,00	10	0	0	25	5

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.2.02.04.02.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.413.400,00	641.340,00	10	0	0	25	5
1.15.2.15.17.1.15.2.02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	272.570.161,00	49.539.032,20	18,17	198.684.331,00	72,89	40,64	76,95
1.15.2.15.17.1.15.2.02.05.02.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	1.125.000,00	15	6.192.200,00	82,56	30	85
1.15.2.15.17.1.15.2.02.05.02.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
1.15.2.15.17.1.15.2.02.05.02.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.2.02.05.02.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	238.070.161,00	47.614.032,20	20	192.492.131,00	80,86	45	85
1.15.2.15.17.1.15.2.02.05.02.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	800.000,00	20	0	0	35	25
1.15.2.15.17.1.15.2.02.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.023.772.701,00	278.652.111,45	27,22	424.086.480,00	41,42	37,72	46,96
1.15.2.15.17.1.15.2.02.06.02.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	142.074.023,00	49.725.908,05	35	25.029.900,00	17,62	50	30
1.15.2.15.17.1.15.2.02.06.02.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	59.194.000,00	11.838.800,00	20	7.481.600,00	12,64	35	35

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.2.02.06.02.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	98.880.000,00	0	0	3.220.000,00	3,26	5	5
1.15.2.15.17.1.15.2.02.06.02.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	723.624.678,00	217.087.403,40	30	388.354.980,00	53,67	40	57
1.15.2.15.17.1.15.2.02.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	164.751.098,00	32.950.219,60	20	56.522.297,00	34,31	30	40
1.15.2.15.17.1.15.2.02.08.02.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	164.751.098,00	32.950.219,60	20	56.522.297,00	34,31	30	40
1.15.2.15.17.1.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.383.158.054,00	162.771.710,80	6,83	84.803.031,00	3,56	16,31	4,47

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.3.02.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	45.507.000,00	9.101.400,00	20	34.925.589,00	76,75	40	78
1.15.2.15.17.1.15.3.02.03.02.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.507.000,00	9.101.400,00	20	34.925.589,00	76,75	40	78
1.15.2.15.17.1.15.3.02.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2.337.651.054,00	153.670.310,80	6,57	49.877.442,00	2,13	15,85	3,04

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.3.02.13.02.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	30.201.000,00	6.040.200,00	20	10.261.198,00	33,98	40	40
1.15.2.15.17.1.15.3.02.13.02.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	553.013.054,00	110.602.610,80	20	15.794.878,00	2,86	50	5
1.15.2.15.17.1.15.3.02.13.02.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	1.569.299.500,00	0	0	3.195.000,00	0,2	0,5	0,22
	1. Belanja Konsultan Perencanaan Dermaga/Pelabuhan	77.700.000,00	0	0	0	0	5	0
	2. Belanja Konsultan Perencanaan Tempat Tambat Tugboat/Tongkang	77.700.000,00	0	0	0	0	5	0
	3. Pembangunan Dermaga/ tempat tambat depan kantor desa rt 013 dusun IV desa tri mulya agung kecamatan lalan	301.182.150,00	0	0	0	0	0	0

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
	4. Pembangunan Dermaga/Tempat Tambat Perahu RT. 01A Dusun 1 Desa Bumi Agung Kecamatan Lalan	301.182.150,00	0	0	0	0	0	0
	5. Pembangunan Dermaga/Tempat Tambat Perahu RT. 01 Dusun 1 Desa Karang Tirta Kecamatan Lalan	301.182.150,00	0	0	0	0	0	0
	6. Pembangunan Dermaga/Tempat Tambat Perahu RT. 09 Dusun 03 Desa Karang Mukti Kecamatan Lalan	301.182.150,00	0	0	0	0	0	0
	7. Pembangunan Dermaga/Tempat Tambat Perahu RT. 12 Dusun 004 Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan	195.271.400,00	0	0	0	0	0	0
	8. Administrasi Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	13.899.500,00	0	0	3.195.000,00	22,99	0	25

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) s/d TW IV BULAN DESEMBER	
			TARGET		REALISASI		TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	Rp.	%		
1	2	3	8	9	10	11	13	14
1.15.2.15.17.1.15.3.02.13.02.13.11	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	185.137.500,00	37.027.500,00	20	20.626.366,00	11,14	40	15
1.15.2.15.17.1.15.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	48.020.000,00	7.203.000,00	15	7.387.659,00	15,38	25	30
1.15.2.15.17.1.15.4.02.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	48.020.000,00	7.203.000,00	15	7.387.659,00	15,38	25	30
1.15.2.15.17.1.15.4.02.01.02.01.02	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	48.020.000,00	7.203.000,00	15	7.387.659,00	15,38	25	30

Dari Tabel 2.3 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II diatas, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja triwulan I sebesar 16,9% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.282.303.996,00,- (12,81%). Capaian kinerja hingga triwulan II sebesar 38,04% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.373.014.024,00,- (35,77%).
2. Secara umum capaian kinerja triwulan I dan triwulan II relatif sesuai dengan target yang direncanakan.
3. Terdapat beberapa sub kegiatan yang hingga triwulan II belum mencapai target yang direncanakan antara lain:
 - a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Fasilitas Kunjungan Tamu, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Sub Kegiatan tersebut belum mencapai target dikarenakan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan yang bersifat dinamis dan tidak tetap.
 - b. Sub kegiatan Pengadaan Mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, serta Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Sub Kegiatan tersebut belum mencapai target disebabkan karena pelaksanaannya dijadwalkan untuk dilaksanakan pada triwulan III tahun anggaran berjalan.
 - c. Sub kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau. Sub Kegiatan tersebut belum mencapai target disebabkan karena menunggu selesainya proses pemeliharaan kapal speedboat dan jetski.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Renja PD

Dengan adanya Rancangan Awal Renja APBD TA. 2025 dengan Rancangan Renja APBDP TA. 2025, perlu kami uraikan beberapa hal sebagai berikut:

- Rancangan Awal maupun Rancangan Akhir disusun dengan tetap mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Secara garis besar perubahan anggaran pada Rancangan Awal dan Rancangan Akhir seperti **Table 2.4.** dibawah ini:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	130.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab.Musi banyuasin	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	69.557.150,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	63.000.150,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen PerangkatDaerah	3 Dokumen	47.445.150,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	15.200.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	46.999.850,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	6.912.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran		100%	6.708.891.232,00	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perkantoran		100%	8.713.112.440,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	6.708.891.232,00	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	8.713.112.440,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	70.135.750,00	Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya kegiatan pengamanan barang milik daerah		1 Dokumen	68.734.750,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	70.135.750,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	68.734.750,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	100.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab.Musi banyuasin	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	100.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas danFungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	100.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran		100%	685.000.000,00	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran		100%	509.309.677,60	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88.276.203,60	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.795.474,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	85.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.500.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	50.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	144.738.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	144.738.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	208.708.808,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	186.928.912,80	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	162.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	186.928.912,80	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	46.708.808,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	24.928.912,80	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang perkantoran		100%	1.970.389.655,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang perkantoran		100%	2.164.755.563,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	254.729.655,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	279.577.563,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.715.660.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.885.178.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	2.039.584.192,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100%	1.968.827.146,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	1.809.265.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	1.754.427.146,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	205.919.192,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan							Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 Unit	24.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	40 Unit	24.400.000,00		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota		100%	2.224.437.200,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota		100%	2.146.745.200,00		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	215 Unit	1.774.803.200,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	215 Unit	1.720.848.200,00		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	449.634.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	425.897.000,00		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin			100%	15.004.650,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin			100%	6.413.400,00		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	15.004.650,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	6.413.400,00	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor		100%	312.183.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor		100%	272.570.161,00	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	45.116.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	7.500.000,00	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	28.084.000,00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	20.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5 Laporan	15.190.000,00	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5 Laporan	3.000.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	183.549.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	238.070.161,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	40.244.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	4.000.000,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	1.305.695.223,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	1.047.412.701,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	284.148.045,00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	157.074.023,00	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	120.608.000,00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	59.194.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Laporan	100.080.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Laporan	99.560.000,00	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	800.859.178,00	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	3 Laporan	731.584.678,00	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan		100%	319.840.419,00	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan		100%	164.751.098,00	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	319.840.419,00	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	164.751.098,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha		100%	91.014.000,00	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha		100%	45.507.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang	1 Laporan	91.014.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang	1 Laporan	45.507.000,00	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Terlaksananya Pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang		100%	2.609.163.050,00	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Terlaksananya Pengawasan kendaraan angkutan penumpang dan barang		100%	982.071.053,60	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	60.402.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30.201.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Unit	663.426.050,00	Pengoperasian dan Pemeliharaan PelabuhanSungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Bulan	553.013.054,00	
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	1.649.799.000,00	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	213.719.499,60	
	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	176 Unit	235.536.000,00	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	176 Unit	185.137.500,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN						PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN						
	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya penerbitanizin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter		100%	88.860.000,00	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	Persentase terlaksananya penerbitanizin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter		100%	48.020.000,00	
	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	88.860.000,00	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Kecamatan Sekayu, Kab. Musi banyuasin	OUTPUT	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	48.020.000,00	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun program dan kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin membuka dan menerima terhadap saran dan masukan dari para *stakeholder* terkait pembangunan di sektor Perhubungan, untuk memperoleh program dan kegiatan yang tepat sasaran atau sesuai dengan tujuan Dinas Perhubungan

Dalam mewujudkan hal tersebut, Dinas Perhubungan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, dimana dalam aturan tersebut terdapat beberapa mekanisme penyerapan usulan dan masukan program atau kegiatan yang berjenjang, yang pertama melalui usulan langsung yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Kemudian, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD), serta usulan usulan *Bottom Up* lainnya.

Hal itu dapat dilihat pada Tabel 2.6. atau T-C. 31 di bawah ini untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2023:

Tabel 2.5. T-C. 31
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025 Kabupaten Musi Banyuasin

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dalam rangka mendukung IKU Kabupaten adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif” dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Infrastruktur.”

Pada tahun 2023-2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki sasaran jangka menengah dalam rangka mendukung IKU Kabupaten yaitu: “Penyediaan Infrastruktur Dasar Untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat” **dengan indikator sasaran** Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap”

Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu :

Tujuan: Terwujudnya Keselamatan, Kenyamanan dan Kelancaran Transportasi Sasaran

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan
2. Meningkatnya keselamatan Transportasi

3.2 Program dan kegiatan

Sehubungan kebijakan nasional dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah peraturan yang mengubah Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Kabupaten Musi Banyuasin wajib melakukan program pembangunan daerah. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka perlu adanya rumusan program dan/atau kegiatan. Secara garis besar, berikut Rekapitulasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, antara Lain:

- Urusan Penunjang terdiri dari 1 (Satu) Program, 8 (Delapan) Kegiatan serta 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan;
- Urusan Pilihan Perhubungan Terdiri Dari 3 (Tiga) Program, 8 (Delapan) Kegiatan serta 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin disajikan pada tabel berikut ini memuat pergeseran antar perubahan di tahun 2025 yang di danai oleh APBD perubahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025.

Alokasi Anggaran Perubahan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin semula anggaran sebesar Rp. 17.913.055.750,00,- menjadi Rp.18.494.716.253,00,- Penambahan sebesar Rp. 581.660.503,00,-.

JUMLAH	DPA AWAL (Rp)	DPA PERUBAHAN (Rp)	KETERANGAN (+/-)
Jumlah Pagu	17.913.055.750,00	18.494.716.253,00,-	581.660.503,00

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 pada Rencana Kerja ada pada Tabel 3.1 T-C.33 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS PERHUBUNGAN				17.913.055.750,00	18.878.907.179,00	18.494.716.253,00	581.660.503,00			32.646.340.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.913.055.750,00	18.878.907.179,00	18.494.716.253,00	581.660.503,00			32.646.340.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				17.913.055.750,00	18.878.907.179,00	18.494.716.253,00	581.660.503,00			32.646.340.000,00	
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah daerah	100 %	100 %	12.346.858.208,00	11.912.709.637,00	13.781.225.639,40	2.599.481.792,00			14.946.340.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	69.557.150,00	-60.442.850,00			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	63.000.150,00	63.000.150,00	47.445.150,00	-15.555.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.200.000,00	-4.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah											
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	46.999.850,00	46.999.850,00	6.912.000,00	-40.087.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 Orang	51 Orang	6.932.019.803,00	6.708.891.232,00	8.713.112.440,00	1.781.092.637,00			7.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/b ulan	104 Orang/ bulan	6.932.019.803,00	6.708.891.232,00	8.713.112.440,00	1.781.092.637,00	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		7.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	70.135.750,00	70.135.750,00	68.734.750,00	-1.401.000,00			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	70.135.750,00	70.135.750,00	68.734.750,00	-1.401.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	685.000.000,00	685.000.000,00	509.309.677,60	-175.690.322,40			1.280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	88.276.203,60	-61.723.796,40	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	83.795.474,00	-66.204.526,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	42.500.000,00	-42.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material											
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	144.738.000,00	-5.262.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Barang Milik SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	208.708.808,00	208.708.808,00	186.928.912,80	-21.779.895,20			312.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		162.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	46.708.808,00	46.708.808,00	24.928.912,80	-21.779.895,20	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen enyediaan Jasa Penunjang Urusan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	2.181.409.655,00	1.970.389.655,00	2.164.755.563,00	-16.654.092,00			2.809.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	254.729.655,00	254.729.655,00	279.577.563,00	24.847.908,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.926.680.000,00	1.715.660.000,00	1.885.178.000,00	-41.502.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		2.509.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.039.584.192,00	2.039.584.192,00	1.968.827.146,00	-70.757.046,00			2.635.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	1.809.265.000,00	1.809.265.000,00	1.754.427.146,00	-54.837.854,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	205.919.192,00	205.919.192,00	190.000.000,00	-15.919.192,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	97 %	97 %	4.417.892.492,00	4.177.160.492,00	3.637.892.560,00	1.212.107.508,00			5.630.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Dokumen	2 Dokumen	2.465.169.200,00	2.224.437.200,00	2.146.745.200,00	-318.424.000,00			2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	215 Unit	2.015.535.200,00	1.774.803.200,00	1.720.848.200,00	-294.687.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	103 Unit	103 Unit	449.634.000,00	449.634.000,00	425.897.000,00	-23.737.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pengelolaan Fasilitas Parkir	1 Dokumen	1 Dokumen	15.004.650,00	15.004.650,00	6.413.400,00	-8.591.250,00			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	15.004.650,00	15.004.650,00	6.413.400,00	-8.591.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Dokumen	5 Dokumen	312.183.000,00	312.183.000,00	272.570.161,00	-39.612.839,00			510.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	9 Orang	45.116.000,00	45.116.000,00	7.500.000,00	-37.616.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	28.084.000,00	28.084.000,00	20.000.000,00	-8.084.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji											
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5 Laporan	5 Laporan	15.190.000,00	15.190.000,00	3.000.000,00	-12.190.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	10 Unit	183.549.000,00	183.549.000,00	238.070.161,00	54.521.161,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	40.244.000,00	40.244.000,00	4.000.000,00	-36.244.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	1.305.695.223,00	1.305.695.223,00	1.047.412.701,00	-258.282.522,00			2.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	284.148.045,00	284.148.045,00	157.074.023,00	-127.074.022,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	120.608.000,00	120.608.000,00	59.194.000,00	-61.414.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas											
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.080.000,00	100.080.000,00	99.560.000,00	-520.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	3 Laporan	3 Laporan	800.859.178,00	800.859.178,00	731.584.678,00	-69.274.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	319.840.419,00	319.840.419,00	164.751.098,00	-155.089.321,00			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	319.840.419,00	319.840.419,00	164.751.098,00	-155.089.321,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3,	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana Prasarana pelayaran dalam kondisi baik	89 %	89 %	1.059.445.050,00	2.700.177.050,00	1.027.578.053,60	10.010.554.950,00			11.070.000.000,00	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan dan Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	91.014.000,00	91.014.000,00	45.507.000,00	-45.507.000,00			120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	91.014.000,00	91.014.000,00	45.507.000,00	-45.507.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau persentase sarana prasarana pelayaran dalam kondisi baik	100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	968.431.050,00	2.609.163.050,00	982.071.053,60	13.640.003,60			10.950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau											
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.402.000,00	60.402.000,00	30.201.000,00	-30.201.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau											
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	10 Unit	10 Unit	422.694.050,00	663.426.050,00	553.013.054,00	130.319.004,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau											
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit	1 Unit	249.799.000,00	1.649.799.000,00	213.719.499,60	-36.079.500,40	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan											
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	176 Unit	176 Unit	235.536.000,00	235.536.000,00	185.137.500,00	-50.398.500,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4,	2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	87 %	87 %	88.860.000,00	88.860.000,00	48.020.000,00	911.140.000,00			1.000.000.000,00	
	2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bandar Udara	1 Dokumen	1 Dokumen	88.860.000,00	88.860.000,00	48.020.000,00	-40.840.000,00			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.04.2.01.0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter											
			Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	88.860.000,00	88.860.000,00	48.020.000,00	-40.840.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	JUMLAH					17.913.055.750,00	18.878.907.179,00	18.494.716.253,00	820.096.150.970,00			32.646.340.000,00	

Pada tabel 3.1 Program dan Kegiatan diatas, terdapat perubahan/perbedaan dana pada beberapa sub kegiatan karena adanya akomodir alokasi anggaran yaitu sebagai berikut: Penambahan Pagu ada pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar 6.932.019.803,00- menjadi 8.713.112.440,00,- dikarenakan terdapat penambahan kekurangan Gaji dan TPP ASN serta Gaji PPPK Sebanyak 104 Orang/bulan.
2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik penambahan Pagu Semula Sebesar Rp. 254.729.655,00,- menjadi Rp. 279.577.563,00,- dikarenakan terdapat Penambahan Kekurangan Pembayaran Listrik, Air dan Telephone selama 1 Bulan sebesar Rp. 24.847.908,00.
3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor penambahan Pagu Semula Sebesar Rp. 1.926.680.000,00,- menjadi Rp. 1.885.178.000,00,- dikarenakan terdapat Penambahan Kekurangan Gaji TKS sebanyak 108 Orang selama 2 Bulan sebesar Rp. 389.031.200.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penambahan Pagu Semula Rp. 1.809.265.000,00,- menjadi Rp. 1.798.847.146,00,- dikarenakan terdapat Penambahan Biaya Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendapatkan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu perubahan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang. Adapun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin 2025 sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan kerja dapat tepat sasaran dan berjalan secara efektif dan efisien.

a. Catatan Penting

Terdapat banyak usulan program kegiatan yang belum terakomodir pada tahun 2024 dikarenakan terbatasnya anggaran yang diperoleh Dinas Perhubungan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan terdapat kekurangan anggaran pada tahun 2025 sehingga dilakukan usulan perubahan untuk tahun 2025.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaannya

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) dan tetap mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan, mulai dari penyusunan rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Prosedur Pengadaan barang dan Jasa.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dipengaruhi oleh sumber dana yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pengambil kebijakan untuk sektor perhubungan, juga akan merasakan dampak positif apabila sektor tersebut dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Dalam mengukur keberhasilan suatu urusan pemerintahan digunakan suatu ukuran yang mampu dievaluasi secara terukur atau yang disebut indikator kinerja.

Dengan demikian Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategi implementasi APBDP serta memberikan arah kejelasan kinerja PD. Dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan, maka Renja dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Sekayu, 28 Juni 2025
Kepala Dinas Perhubungan,



Musni Wijaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001